

SWI

Pemko Bukittinggi Terima 21 Sertifikat bidang tanah dari BP Guna Amankan Aset Daerah

Linda Sari - BUKITTINGGI.SWI.OR.ID

Nov 20, 2024 - 20:34



Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi menerima sertifikat bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BKN) Kota Bukittinggi.

Sertifikat tersebut diterima secara langsung oleh Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, di Ruang Kerja Wali Kota Bukittinggi. Rabu, 20 November 2024.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, didampingi Kepala Dinas Perkim, Ebyuleris, dan Inspektur Kota, Elvina Kartika Esya, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi yang sudah menyelesaikan sertifikat aset milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tahun 2024 ini Pemko Bukittinggi mengajukan 50 bidang tanah untuk proses sertifikasi ke BPN dan hari ini sudah diterima sebanyak 26 sertifikat.

"Hari ini alhamdulillah kita sudah menerima kembali sebanyak 21 sertifikat aset, sebelumnya Pemko Bukittinggi juga sudah menerima sebanyak 5 sertifikat, dan sisanya segera menyusul pada minggu pertama bulan Desember nantinya. Kami ingin seluruh aset Pemko berupa tanah terlindungi dan dikelola dengan baik demi masa depan Kota Bukittinggi yang lebih baik. Sertifikat ini adalah bentuk komitmen Pemko Bukittinggi dalam pengamanan aset-aset daerah untuk kepentingan bersama dan menghindari sengketa atau permasalahan kepemilikan di kemudian hari," ujarnya.

Pjs Wako Bukittinggi, menambahkan, sertifikasi ini juga merupakan komitmen Pemko Bukittinggi melaksanakan program Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Pemko Bukittinggi dan BPN dalam mengamankan aset-aset strategis. Dengan adanya sertifikat ini, aset Pemerintah Kota Bukittinggi lebih terjaga dan terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala BPN Kota Bukittinggi, Isman Yandri, menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Sertifikasi aset daerah menjadi sangat penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

"Hari ini kami menyerahkan 21 sertifikat kepada Pemko Kota Bukittinggi sebagai bentuk komitmen untuk melegalitaskan aset pemerintah. Kami memahami bahwa aset-aset ini memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, dan BPN akan terus mendukung upaya Pemko untuk memperkuat pengelolaan dan keamanan aset mereka," jelasnya. (**)